

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agrowisata adalah perpaduan antara pariwisata dan pertanian yang memprioritaskan praktik pertanian berkelanjutan sekaligus berfungsi sebagai daya tarik wisata. Dalam konteks ekonomi lokal dan nasional, Indonesia memiliki kekayaan akan keanekaragaman sumber daya alam dan potensi pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Agrowisata memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian lokal, mendorong produksi pertanian, dan menciptakan lapangan pekerjaan di komunitas lokal (Anggraini et al., 2023). Agrowisata sangat penting untuk memperkuat pengelolaan ekonomi lokal dan harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Intervensi yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelatihan teknologi, dan promosi yang efektif dapat menjadi strategi kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan Agrowisata memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat di lingkungan (Kalawawo et al., 2023). Agrowisata diyakini memiliki potensi terhadap pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Ramadhan et al., 2025). Agar potensi tersebut dapat terwujud secara optimal, pengelolaan Agrowisata memerlukan strategi berkelanjutan guna memberikan manfaat ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan, harus memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi untuk memberikan keadilan bagi semua pemangku

kepentingan (Trisnanto et al., 2023). Perencanaan dan pengelolaan Agrowisata harus melibatkan masyarakat lokal agar dapat berkelanjutan. Salah satu perencanaan tersebut adalah penerapan strategi *Community Based Tourism* (CBT), hal ini tidak hanya memberikan rasa kepemilikan yang lebih besar bagi masyarakat lokal tetapi juga meningkatkan perekonomian lokal (Jafaruddin et al., 2020). Pelatihan pemasaran digital dan penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan, serta menarik lebih banyak pengunjung (Kamisah et al., 2024).

Keberadaan kebijakan pemerintah yang menunjukkan adanya inisiatif dari pemerintah yang mendorong pertumbuhan Agrowisata. Komitmen terhadap pengelolaan Agrowisata juga tercermin dalam kebijakan pemerintah, salah satunya adalah Undang-Undang No.10 Tahun 2009 pasal 4 yang menjelaskan tentang Kepariwisata. Undang-undang tersebut menekankan pentingnya menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan dan partisipatif (Setiawan et al., 2026). Dalam konteks Agrowisata, hal ini berarti bahwa masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, serta lingkungan (Purnomo et al., 2025). Selain memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, keberlanjutan dalam Agrowisata sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem pertanian (Asmin, 2016). Agrowisata berkontribusi pada pendidikan lingkungan dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya alam. Agrowisata berpotensi menjadi model pertumbuhan pariwisata yang

memprioritaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain keuntungan finansial jika dikelola dengan baik.

Menurut Rani (2014), pariwisata dapat dianggap sebagai energi pendorong bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat karena merupakan kegiatan yang secara langsung terkait dengan dan melibatkan masyarakat setempat, sehingga memberikan berbagai dampak terhadap kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Seiring dengan pertumbuhannya yang pesat, pariwisata telah memunculkan sejumlah gagasan, termasuk ekowisata, wisata desa, dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Gagasan ini merupakan pendekatan dalam pengelolaan pariwisata yang memastikan bahwa kegiatan wisata juga dapat berlangsung di lokasi-lokasi wisata non-perkotaan. Pariwisata adalah kegiatan yang memiliki banyak aspek dengan komponen-komponen yang saling terkait, bukan hanya terbatas pada satu dimensi saja. Pariwisata dapat dibentuk dan diperkuat oleh sejumlah sektor, seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Penguatan sektor pariwisata juga dapat didasarkan pada masalah demografi.

Salah satu daerah di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki potensi pariwisata berkelanjutan yaitu Desa Ngringinrejo. Desa tersebut memiliki sektor pertanian yang dijadikan sebagai suatu keunggulan lokal yang dapat dikembangkan seperti area kebun belimbing yang sudah menjadi kawasan wisata yang saat ini dikenal dengan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo. Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo memiliki potensi yang besar untuk pengelolaan Agrowisata. Agrowisata ini dikelola oleh

BUMDes Tirto Abadi Desa Ngringinrejo dengan luas lahan 20,4 hektar dengan jumlah pohon sebanyak 10.250 pohon, kapasitas produksi sebesar 80 kg per pohon per tahun, dan frekuensi panen sebanyak empat kali setiap tahun dengan masa panen tiga bulan.

Kontribusi dari adanya Agrowisata Kebun Belimbing ini adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun sebagian orang bekerja sebagai petugas parkir bagi para pengunjung dan penjual belimbing, mayoritas dari mereka adalah petani belimbing. Melalui wadah Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis) masyarakat diarahkan tentang tata cara mengelola kebun mereka dengan baik sehingga, selain menghasilkan buah belimbing berkualitas tinggi dalam berbagai varietas, mereka juga dapat meningkatkan nilai ekonomi buah belimbing melalui produk olahan seperti dodol, jus buah, dan sirup. Selain sebagai lokasi produksi buah, Kebun Belimbing juga diharapkan dapat menarik wisatawan yang ingin belajar tentang pertanian dan menikmati pengalaman berinteraksi dengan alam secara langsung. Meskipun memiliki potensi yang cukup besar dalam pengelolaan Agrowisata, Kebun Belimbing masih mengalami tantangan dalam menarik pengunjung, baik di hari kerja maupun di hari libur.

Destinasi wisata menghadapi persaingan yang ketat akibat pertumbuhan industri pariwisata yang pesat, baik di tingkat nasional maupun regional. Agar suatu destinasi wisata dipilih oleh sebagian besar wisatawan, destinasi tersebut harus mampu memenangkan persaingan yang menawarkan banyak pilihan kepada para pengunjung. Salah satu cara untuk memenangkan persaingan

tersebut adalah dengan mengembangkan strategi kompetitif bagi destinasi wisata dengan tujuan memperoleh keunggulan kompetitif dalam destinasi pariwisata.

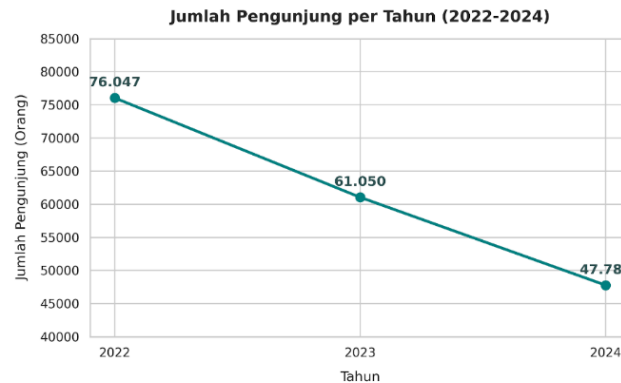
TABEL 1
DATA JUMLAH PENGUNJUNG AGROWISATA KEBUN BELIMBING DI
DESA NGRINGINREJO KABUPATEN BOJONEGORO

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2022	76.047
2.	2023	62.169
3.	2024	47.782

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil temuan peneliti pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah pengunjung di Agrowisata Kebun Belimbing dari tahun 2022-2024. Kolaborasi formal antar *stakeholder* memang sudah dilakukan, seperti Dinas Pariwisata, Paguyuban Jelajah Taman Bumi (JTB), MCM Hotel Wisata, BUMDes, POKDARWIS, dan masyarakat. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa *stakeholder* tersebut belum berjalan optimal karena masih ada beberapa *stakeholder* yang tidak ikut andil secara partisipatif, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pengelolaan sarana prasarana dan penurunan jumlah pengunjung di Agrowisata Kebun Belimbing.

GAMBAR 1
GRAFIK JUMLAH PENGUNJUNG



Sumber : Data Data diolah Oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan visualisasi grafik di atas, volume kunjungan tahunan di Agrowisata Kebun Belimbing Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren penurunan jumlah wisatawan. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan berada pada angka 76.047 orang. Memasuki tahun 2023, angka tersebut merosot sebesar 19,72% menjadi 61.050 orang, dan terus mengalami penurunan sebesar 21,73% pada tahun 2024 hingga menyisakan 47.782 pengunjung. Secara akumulatif, dalam kurun waktu tiga tahun, destinasi ini kehilangan sekitar 37,16% basis pengunjung tahunannya dengan laju kemerosotan rata-rata mencapai -20,73% per tahun.

Adapun hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo menyatakan bahwa penurunan jumlah pengunjung di Agrowisata terjadi karena kurangnya pembaruan dalam sarana prasarana, seperti gazebo dan arena bermain yang sudah rusak serta graha pertemuan yang sudah tidak terawat. Kemudian dalam kolaborasi yang dilakukan kurangnya keaktifan POKDARWIS dalam mempromosikan

Agrowisata Kebun Belimbing, yang mana di tengah ketatnya persaingan industri pariwisata saat ini, langkah promosi yang dilakukan oleh POKDARWIS masih sangat terbatas dan konvensional. Mereka cenderung pasif dan kurang memanfaatkan teknologi informasi, serta belum mengoptimalkan keterlibatan media sosial sebagai mitra promosi utama. Promosi merupakan aspek yang krusial namun sering diabaikan dalam pengelolaan Agrowisata (Sayuti et al., 2022).

Lemahnya strategi promosi oleh POKDARWIS kian diperparah oleh minimnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yang mana penyediaan, pembaruan, dan perawatannya merupakan bagian dari tanggung jawab tata kelola Pemerintah Desa (PEMDES). Berdasarkan teori tata kelola agrowisata, Pemdes bersama pelaku ekonomi desa seperti BUMDes memegang peran krusial dalam perencanaan berbasis konteks, penyediaan dana, serta pengelolaan operasional demi mewujudkan ekosistem wisata desa yang berkelanjutan. Namun, di Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo, tanggung jawab Pemdes dalam hal ini diwujudkan melalui badan usahanya, BUMDes Tirta Abadi terkait pengelolaan infrastruktur dirasa belum berjalan optimal. Ketidaksiapan Pemdes dalam menjalankan tanggung jawab penyediaan fasilitas yang prima ini menciptakan dampak nyata ketika Pokdarwis berjuang dengan keterbatasan promosi konvensional, wisatawan yang datang justru disuguhi oleh fasilitas penunjang yang rusak dan kurang terawat.

Maka hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan mendasar terkait lemahnya jejaring kerja sama serta komitmen antar pemangku kepentingan, seperti Dinas Pariwisata, Paguyuban Jelajah Taman Bumi (JTB), MCM Hotel Wisata, BUMDes, POKDARWIS, dan masyarakat. Lemahnya kolaborasi jejaring peran dan komitmen antar aktor dalam pengelolaan Agrowisata Kebun Belimbing di Desa Ngringinrejo tidak dapat bertumpu pada satu pihak saja, melainkan harus digerakkan secara multisektoral melalui tata kelola bersama melalui pendekatan *Collaborative Governance*.

Menurut Ansell & Gash (2008), *Collaborative Governance* merupakan suatu proses di mana satu atau lebih organisasi pemerintah dan non-pemerintah bekerja sama untuk mengambil keputusan guna mengelola sumber daya publik dan melaksanakan kebijakan publik. Definisi tersebut menekankan bahwa bagaimana berbagai sektor berkontribusi terhadap dampak suatu kebijakan publik, yang mana dalam konteks ini mencakup sinergi antara Dinas Pariwisata, Paguyuban JTB, MCM Hotel Wisata, BUMDes Tirto Abadi, Pokdarwis, dan masyarakat dalam mengelola potensi wisata desa. Sebagai alat analisis untuk membedah dinamika hubungan antar-aktor tersebut, teori kolaborasi menurut Ansell & Gash (2008) memiliki 5 (lima) fokus kolaborasi, yakni: (1) Dialog Tatap Muka (*Face To Face Interaction*), (2) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), (3) Komitmen Pada Proses (*Commitment To The Process*), (4) Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*), (5) Hasil Kolaborasi (*Intermediate Outcomes*), di mana kelima indikator ini saling mengikat secara kausalitas dengan realitas permasalahan di lapangan.

Dari lima fokus yang ada, terdapat tiga indikator yang relevan dengan akar permasalahan di lapangan, yaitu komitmen pada proses (*commitment to the process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil kolaborasi (*intermediate outcomes*). Indikator pertama adalah komitmen pada proses (*commitment to the process*), di mana fokus ini menekankan pentingnya andil aktif, keterlibatan penuh, serta rasa kepemilikan dari seluruh aktor demi mencapai tujuan bersama. Realitas di Agrowisata Kebun Belimbing justru memperlihatkan adanya masalah mendasar berupa lemahnya komitmen dalam jejaring kerja sama. Pokdarwis Agro Jaya cenderung pasif dan terbatas dalam menjalankan langkah promosi konvensional tanpa mengoptimalkan teknologi informasi, sementara di sisi lain, Pemerintah Desa (Pemdes) bersama BUMDes Tirta Abadi belum optimal menjalankan tanggung jawab operasionalnya dalam merawat infrastruktur penting, seperti gazebo dan arena bermain anak rusak serta graha pertemuan tidak terawat.

Indikator kedua, yaitu pemahaman bersama (*shared understanding*), yang menuntut adanya visi, misi, dan pemahaman bersama mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh semua pemangku kepentingan. Di Agrowisata Kebun Belimbing, belum terciptanya pemahaman yang selaras mengenai tata Kelola Agrowisata yang berkelanjutan. Sistem pengelolaan Agrowisata berkelanjutan di destinasi wisata ini belum maksimal. Akibatnya, kurangnya kesiapan pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas yang memadai berdampak nyata, yang bisa dirasakan oleh pengunjung yang disambut dengan fasilitas yang rusak dan tidak terawat.

Ketidakberhasilan dalam membangun komitmen dan pemahaman bersama pada proses ini pada akhirnya berujung pada kegagalan indikator ketiga, yaitu hasil kolaborasi (*intermediate outcomes*). Secara teoritis, hasil kolaboratif adalah pencapaian konkret atau produk langsung yang dihasilkan dari kolaborasi yang berhasil. Namun, akibat proses kolaborasi yang kurang memadai di lapangan, justru timbul dampak negatif yang signifikan, seperti penurunan jumlah pengunjung, dari 76.047 orang pada tahun 2022 merosot menjadi hanya 47.782 orang pada tahun 2024.

Oleh karena itu, berdasarkan konteks permasalahan penelitian dengan analisis kajian keilmuan, maka penting adanya untuk dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait kajian *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Agrowisata Kebun Belimbing di Desa Ngringinrejo, Kabupaten Bojonegoro. Dengan menggunakan pendekatan *Collaborative Governance* dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi setiap stakeholder serta mengoptimalkan capaian hasil kolaborasi demi meningkatkan kembali minat kunjungan wisatawan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan jumlah pengunjung yang signifikan di Agrowisata Kebun Belimbing dari tahun 2022-2024.

2. Kurangnya pembaruan serta rusaknya sarana dan prasarana pendukung seperti gazebo, arena bermain anak yang rusak, dan graha pertemuan yang tidak terawat di lokasi Agrowisata.
3. Terbatasnya strategi dalam promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh pihak POKDARWIS.
4. Belum optimalnya kolaborasi di lapangan, di mana tidak semua *stakeholder* ikut andil secara aktif dan partisipatif dalam proses pengelolaan Agrowisata Kebun Belimbing.

Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti dan mendeskripsikan *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash (2008) diantaranya yaitu (1) Dialog Tatap Muka (*Face To Face Interaction*), (2) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), (3) Komitmen Pada Proses (*Commitment To The Process*), (4) Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*), (5) Hasil Kolaborasi (*Intermediate Outcomes*). Pendekatan ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan mengurangi berbagai faktor yang menyebabkan penurunan jumlah pengunjung di Agrowisata Kebun Belimbing. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai pengelolaan Agrowisata dengan judul **“*Collaborative Governance* dalam pengelolaan Agrowisata Kebun Belimbing di Desa Ngringinrejo Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terkait latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Agrowisata Kebun Belimbing di Desa Ngringinrejo Kabupaten Bojonegoro?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan tentang pelaksanaan terkait *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Agrowisata Kebun Belimbing di Desa Ngringinrejo Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan referensi akademis bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam tema yang relevan bagi peneliti yang lain.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam pengelolaan agrowisata. Hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan agrowisata, baik dalam perbaikan fasilitas maupun peningkatan sumber daya-nya.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi dalam bidang pariwisata.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan merupakan pokok-pokok dalam penulisan dalam penelitian ini dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Agrowisata Kebun Belimbing di Desa Ngringinrejo Kabupaten Bojonegoro” untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini. Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

Bab I pendahuluan, bab ini merupakan garis besar terkait judul penelitian yang mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini merupakan gambaran beberapa teori referensi yang mendukung penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis dan tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari sumber data terkait topik penelitian.

Bab V Penutup, adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan terhadap pembahasan bab-bab sebelumnya yang sekaligus memberikan jawaban terhadap tujuan penelitian, dan saran-saran yang terkait permasalahan dan masalah penelitian.